

UMKM Sebagai Peningkatan Pembangunan Ekonomi Bangsa Indonesia

¹Astri Putri Utami, ²Arista Rahmahita, ³Deris Dermawan

¹Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 5553210102@untirta.ac.id

²Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 5553210064@untirta.ac.id

³Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, derisdermawan@untirta.ac.id

Abstract

Progress in today's globalized world is often measured by economic success, making it a leading indicator for government spending. MSMEs play an important role in national economic development, especially economic development (MSMEs). Strategic importance is placed on the role played by MSMEs in the national economy. The reason for this Indonesian economic trend is thought to come from the rise of MSMEs there. After the 2008 financial crisis, SMEs and MSMEs continued to grow. This is another proof that SMEs can weather the current economic storm. In addition, the National SME sector has become a major employer. The MSME industry has the potential to boost household income thanks to the many jobs created. For this reason, SMEs are given an important role to play in the fight against poverty and unemployment. The government continues to encourage MSMEs by providing them with the means they need to succeed so that they can fulfill their role as the backbone of the creation of the national economy. Growth must include the role of the community as a driver and prioritize the development of a sense of belonging and community. Welfare improvement is one of the benchmarks of a country's progress. It is very important for a country to focus on economic growth in order to grow its people's per capita income and standard of living.

Keywords: Economy, Development, MSMEs, Society.

Pendahuluan

Pada akhirnya, tujuan dari setiap proyek pembangunan seharusnya adalah untuk meningkatkan sejauh mana suatu komunitas tertentu dapat membentuk nasibnya sendiri. Perbaikan kondisi kehidupan adalah salah satu hasil dari kemajuan. Di era internasionalisasi ini, pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama kemajuan suatu negara. Pembangunan yang tidak merata di bidang kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, serta pembangunan yang hanya bertumpu pada pertumbuhan yang terkonsentrasi, akan membuat kemajuan yang dicapai di bidang-bidang tersebut rentan. Jadi, partisipasi masyarakat dan rasa memiliki sangat penting untuk setiap usaha yang bermanfaat. Peningkatan kesejahteraan ialah salah satu tolak ukur berkembangnya suatu negara. Sangat penting bagi suatu negara untuk fokus pada pertumbuhan ekonomi untuk menaikkan pendapatan per kapita dan standar hidup. Indikator ekonomi suatu negara dan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi adalah tingkat kenaikan pendapatan per kapita dalam analisis makro ekonomi.

Mengembangkan ekonomi suatu wilayah membantu penduduk dengan memperluas akses mereka ke barang-barang konsumen dan kemungkinan pekerjaan. Perekonomian daerah dapat dibentuk dan dikembangkan dengan bantuan upaya pembangunan ekonomi yang melibatkan semua tingkat masyarakat dan pemerintahan,

mengambil inisiatif pembangunan daerah, dan memanfaatkan semua sumber daya pendukung yang tersedia. Pujiono (2012). Tujuan pembangunan nasional di Indonesia adalah menaikkan taraf hidup rakyat Indonesia dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK secara bertanggung jawab dan tumbuh di dalam negeri. Untuk tujuan pasal ini, "pembangunan nasional" mengacu pada tindakan pemerintah dan rakyat suatu negara secara keseluruhan. Masyarakat memainkan peran penting dalam pembangunan, dan pemerintah ditugaskan untuk membimbing dan melindungi mereka sambil juga membina lingkungan yang memungkinkan, aman, dan damai untuk membantu pertumbuhan nasional. Lapangan kerja di Indonesia sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk yang memasuki angkatan kerja. Pengangguran adalah hasil yang tak terhindarkan dari ini. Ini adalah masalah besar di seluruh negara Indonesia (Indra, 2016).

Tujuan akhir dari setiap proyek pembangunan haruslah pengurangan penderitaan manusia. Apa pun tingkat pemerintahan yang Anda lihat—nasional, provinsi, kabupaten, atau kota—kemiskinan merupakan tantangan serius untuk maju. Kaum miskin tertinggal dari kelompok lain dalam masyarakat yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka karena mereka kurang mampu menjalankan bisnis dan memiliki lebih sedikit akses ke kegiatan sosial ekonomi, pendidikan, dan perawatan kesehatan (Rah Adi, 2018).

UMKM memegang peran penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi. Kepentingan strategis ditempatkan pada peran yang dimainkan oleh UMKM dalam perekonomian nasional. Kemungkinan besar, hal ini terjadi karena UMKM mendominasi perekonomian Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini menciptakan sebagian besar pekerjaan negara dan membuat penyok yang cukup besar dalam PDB. Kontribusinya cukup besar. Ada juga fakta bahwa banyak industri, terutama yang melibatkan pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, dan jasa makanan, sangat bergantung pada tenaga kerja manusia dan sumber daya alam, yang memberi UMK keunggulan kompetitif. Industri seperti pariwisata, perbankan, persewaan, layanan perusahaan, dan kehutanan semuanya mendapat manfaat dari keahlian nilai tambah dari bisnis menengah. Perusahaan dengan ukuran tertentu menikmati keuntungan di sektor-sektor seperti industri makanan dan minuman, sektor energi dan gas, sektor komunikasi dan pertambangan, dan sektor pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa baik usaha kecil maupun besar sangat penting bagi perekonomian, dengan yang pertama memiliki keunggulan dalam hal menyerap pekerja baru dan meningkatkan PDB.

Berdasarkan tabel posisi kredit UMKM pada bank umum tahun 2016-2017 dapat dilihat bahwa UMKM mengalami perkembangan . lapangan usaha pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan contohnya mengalami kenaikan dari 75.744 miliar rupiah menjadi 98.199 miliar rupiah. Pada sektor jasa keuangan dan komunikasi (real estate) juga mengalami kenaikan dari 14.404 miliar rupiah menjadi 15.744 miliar rupiah.

Tabel 2. Beberapa Pengertian UMKM Menurut Beberapa Lembaga dan Peneliti

Lembaga	Istilah	Batasan Pengertian Secara Umum
UU No. 9/95 (Usaha Kecil)	Usaha Kecil	Aset \leq Rp 200 juta di luar tanah dan bangunan atau Omset \leq Rp 1 milyar per tahun
INPRES No.10/1999	Usaha Menengah	Memiliki kekayaan bersih Rp 200 juta – Rp 10 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
Badan Pusat Statistik (BPS)	Usaha Mikro	Pekerja < 5 orang termasuk tenaga kerja keluarga
	Usaha Kecil	Pekerja 5 – 9 orang
	Usaha Menengah	Pekerja 20 – 99 orang
Menteri Negara Koperasi dan UKM	Usaha Kecil	Aset < Rp 200 juta di luar tanah dan bangunan Omset < Rp 1 milyar/tahun atau independen
	Usaha Menengah	Aset > Rp 200 juta atau Omset Rp 1–10 milyar per tahun
Bank Indonesia (BI)	Usaha Mikro	Dijalankan oleh rakyat miskin atau dekat miskin, bersifat usaha keluarga, menggunakan sumber daya lokal, menerapkan teknologi sederhana dan mudah keluar masuk industri
	Usaha Kecil	Aset < Rp 200 juta atau Omset Rp 1 milyar
	Usaha Menengah	Untuk kegiatan industri, Aset < Rp 5 milyar, untuk lainnya (termasuk jasa), Aset <Rp 600 juta diluar tanah dan bangunan atau Omset < Rp 3 milyar per tahun.
Bank Dunia	Usaha Mikro	Pekerja < 10 orang, Aset < \$100.000 atau Omset < \$100.000 per tahun
	Usaha Kecil	Pekerja < 50 orang, Aset < \$ 3 juta atau Omset < \$ 3 juta per tahun
	Usaha Menengah	Pekerja < 300 orang, Aset < \$ 15 juta atau Omset < \$ 15 juta per tahun
Staley & Morse (Modern Small Industry)	Usaha Mikro	Pekerja 1 – 9 orang
	Usaha Kecil	Pekerja 10 – 49 orang
	Usaha Menengah	Pekerja 50 – 99 orang
Anderson Tommy D. (University of Gothenberg Sweden)	Usaha Mikro	Pekerja 1 – 9 orang (Usaha Kecil I)
	Usaha Kecil	Pekerja 10 – 19 orang (Usaha Kecil II)
	Usaha Menengah	Pekerja 100 – 199 orang (Besar – kecil) Pekerja 201 – 499 orang (Kecil – menengah) Pekerja 500 – 999 orang (Menengah – menengah) Pekerja 1000 – 1999 orang (Besar – menengah)
Prasetyo P. Eko (Peneliti)	Usaha Mikro	Pekerja 1 – 9 orang (industri kerajinan rumah tangga)
	Usaha Kecil	Pekerja 5 – 20 orang (industri kecil dengan mesin) Pekerja 10 – 49 orang (industri kecil tanpa mesin)
	Usaha Menengah	Pekerja 50 – 99 orang (industri menengah)

Sumber: Krisnamurti, (dalam Yustika, 2005)

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan strategi deskriptif kualitatif dengan pencarian literatur, yang melibatkan menemukan temuan studi yang dipublikasikan melalui publikasi online dan cetak, perpustakaan digital, dan sumber daya elektronik lainnya. Chrome dan Scholar digunakan untuk mencari jurnal ilmiah. Gunakan kata kunci untuk melakukan pencarian jurnal: perusahaan kecil, menengah dan mikro, pembangunan ekonomi nasional, pilar ekonomi nasional. Untuk membuktikan bahwa UMKM sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional, kami mempelajari setiap data untuk menguatkan temuan kami sebelumnya.

Hasil Dan Pembahasan

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) menarik dari berbagai sudut, termasuk bisnis, kredit, dan keamanan finansial. Sebagai hasil dari globalisasi dan,

khususnya, integrasi ekonomi Asia Tenggara, atau persatuan ekonomi, kawasan ini telah bergabung menjadi satu komunitas ekonomi yang terdiri dari banyak basis manufaktur. Membangun fondasi yang kuat dalam ekonomi global sangat penting bagi usaha kecil, menengah, dan mikro. Dalam hal ini, UMKM harus mampu bersaing dan menawarkan produk yang diterima tidak hanya oleh konsumen rumahan (Indonesia) tetapi juga konsumen di Asia Tenggara. Karena permintaan yang konstan untuk layanan mereka, UMKM tidak pernah gulung tikar. UMKM ini selalu menunjukkan keuletannya, apalagi saat negara kita diguncang badai malapetaka ekonomi (sejak Juli 1997). (sejak Juli 1997). Hal ini menunjukkan bahwa UMKM ini merupakan salah satu sektor ekonomi primer yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Data dari BPS dan Kementerian Koperasi Wahyudin (2013: 27) untuk semua kategori perusahaan menunjukkan bahwa usaha kecil di Indonesia mencapai sekitar 99%, yang menunjukkan bahwa hampir semua perusahaan di Indonesia adalah usaha kecil dan hanya 1% adalah perusahaan menengah dan besar.

Keterlibatan pemerintah dalam memperkuat usaha kecil, menengah, dan mikro (UKM) dimaksudkan untuk mendorong iklim investasi, meningkatkan semangat usaha, dan menjadikan UKM sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi nasional. Mengingat pentingnya mereka bagi perekonomian negara, UMKM harus mendapat pertimbangan ekstra oleh pembuat undang-undang. Di bawah pembinaan Kementerian Koperasi dan UMKM, diharapkan UMKM bersama koperasi dapat membantu perekonomian nasional dalam kegiatannya. Terlepas dari ketersediaan sejumlah besar sumber daya alam, dibutuhkan beberapa kecerdikan untuk meningkatkan nilai produk dan layanan akhir. Yang dimaksud dengan "pembangunan ekonomi" adalah proses peningkatan kualitas sosial sektor ekonomi.

Untuk dapat bersaing dengan sektor UMKM yang memperluas jaringan bisnisnya, terutama di ranah digital, para operator perusahaan UMKM perlu mengiklankan produknya di search engine dan media sosial. Itu dibuat di daerah itu, dan peningkatan penjualannya berarti lebih banyak uang di kantong orang—penting untuk berinvestasi dalam hal-hal seperti sekolah, rumah sakit, dan penyedia layanan yang lebih baik (Vadilla, 2020).

Peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat adalah dengan mencari tambahan opsi pendanaan domestik dan internasional. Investasi dari negara lain adalah salah satu cara untuk mendapatkan uang tunai dengan cepat. Alasannya, hampir semua negara berkembang kekurangan sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan ini sendiri (Cep Jandi, 2016).

Terjadi fluktuasi pada tahun 2011 sampai 2012 pada pertumbuhan UMKM. Berikut ini adalah gambaran meningkatnya UMKM di Indonesia.

Tabel 3. Perkembangan UMKM pada Tahun 2011 hingga 2012

Keterangan Usaha	2011	2012
Besar	41,95%	40,92%
Menengah	13,46%	13,59%
Kecil	9,94	9,68%
Mikro	34,64	38,81

Pada tahun 2011 perkembangan UMKM berada di angka 41,94%, kemudian pada tahun berikutnya mengalami penurunan yaitu 40,92%. Pada usaha menengah tahun 2011 yaitu 13,46% meningkat si tahun 2012 yaitu 13,59%. Sementara itu, usaha kecil

pada tahun 2011 adalah 9,94% mengalami penurunan di tahun 2012 yaitu 9,68%. Pada usaha mikro terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari 2011 pada angka 34,64% menjadi 38,81% di tahun 2012.

Data dibawah ini akan menjelaskan data pertumbuhan UMKM yang berperan terhadap PDB dan nilai ekspor di Indonesia.

Tabel 4. Peranan UMKM pada Nilai PDB & Nilai Ekspor tahun 2011 hingga 2013

Keterangan	2011	2012	2013
Sumbangan PDB (dalam Miliar)	1.369.320,00	1.452.460,20	1.536.918,80
Perkembangan sumbangan PDB	6,76%	6%	5,89%
Ekspor (dalam Miliar)	187.441,82	166.626,50	182.112,70%
Perkembangan Nilai Ekspor	6,56%	-11,10%	9,29%

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan UMKM dari tahun 2011-2013 mengalami naik turun. Pada tahun 2011 sumbangan PDB sebesar 6,76% tetapi di tahun 2012 menurun sebesar 6% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 5,89%.

UMKM di Indonesia berperan penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Karena UMKM merupakan pemilik usaha dibandingkan dengan perusahaan besar, dan memiliki keunggulan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja sebagai bagian dari berkembangnya ekonomi Indonesia. Berdasarkan fakta tersebut, UMKM harus dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan operasional dan pengembangannya.

Oleh karena itu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, arah pembangunan ekonomi haruslah demokrasi ekonomi yang bertujuan membebaskan rakyat dari keterbelakangan dan kemiskinan. Setiap organisasi atau kelompok orang yang beroperasi untuk tujuan utama menghasilkan uang dianggap sebagai bisnis kecil. Dalam konteks ini, "bisnis kecil" berarti persis seperti itu. Ini adalah kegiatan ekonomi penjahat dan memenuhi standar hukum kekayaan bersih atau omset tahunan untuk usaha kecil sebagaimana ditentukan oleh Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/1/UKK tentang Kredit Usaha Kecil (KUK adalah perusahaan dengan total aset maksimum sebesar Rp600.000.000 dan berdasarkan UU No. 29 Tahun 1995 yang berarti Usaha Kecil (Usaha Kecil) (seperti kepemilikan). Usaha mikro, kecil, dan menengah (kadang-kadang dikenal sebagai "UMKM") dijalankan oleh pemilik tunggal, kelompok kecil investor, atau bahkan seluruh keluarga yang hanya menggunakan alat dan teknik yang belum sempurna. Selain meninggalkan dunia usaha (Bank Indonesia).

Perekonomian suatu negara sangat bergantung pada usaha kecil, mikro, dan menengahnya. Pemerintah mengakui peran penting UKM dan berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan mereka. Untuk meningkatkan daya saing mereka, UMKM perlu mengembangkan keterampilan teknis dan inovasi inovatif, yang hanya dapat dicapai dengan bantuan dari luar. Meningkatnya standar hidup sebanding dengan peningkatan produktivitas, yang pada gilirannya berhubungan langsung dengan kemajuan teknologi. Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional dapat dirinci menjadi lima kategori besar: (1) penyumbang kegiatan ekonomi yang signifikan; (2) pemberi kerja utama tenaga kerja; (3) kontributor yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat; (4) pembangkit pasar baru dan sumber inovasi; dan (5) faktor penting

dalam neraca pembayaran. Sebagai mesin penggerak perekonomian negara, Effendi Ishak (2005). Salah satu masalah paling luas yang dihadapi oleh pemilik dan operator usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah kelangkaan pekerja berkualitas.

Tingkat orisinalitas negatif, kecerdikan, kapasitas untuk meramalkan peluang, dan penggunaan sumber daya keuangan atau promosi. Sebagus apapun sebuah produk, ia akan kesulitan bersaing di pasar jika tidak dipromosikan ke calon pembeli. Akibatnya, jaringan bisnis yang solid sangat penting bagi anggota UMKM untuk mempromosikan produk mereka. Sektor UKM pada kenyataannya tidak bebas masalah. Sebenarnya, pertumbuhan industri ini disertai dengan sejumlah tantangan yang memerlukan pertimbangan dan pengelolaan yang cermat. Komersialisasi terhambat, sebagian, oleh masalah termasuk terbatasnya akses lembaga keuangan ke pendanaan karena agunan (jaminan) yang tidak memadai dan kurangnya kecerdasan pasar. Akibatnya adalah kurangnya fokus pada pasar dan menurunnya kemampuan bersaing secara internasional.

Peningkatan daya saing UKM memerlukan pengaturan pasar yang lebih ketat dalam menghadapi mekanisme pasar yang lebih terbuka dan kompetitif. Oleh karena itu, sangat penting bagi UKM untuk memiliki akses yang cepat dan mudah ke data mengenai industri manufaktur dan pasar untuk input produksi. Dalam rangka meningkatkan jalur distribusi produk-produk buatan UMKM, data pasar manufaktur sangat dibutuhkan. Effendi Ishak (2005) menyatakan bahwa pengetahuan tentang produksi atau pasar komoditas sangat diperlukan. Pengetahuan ini harus mencakup, namun tidak terbatas pada: (1) jenis komoditas yang dibutuhkan; (2) daya beli masyarakat; (3) harga pasar saat ini; (4) selera konsumen lokal; pasar daerah; dan pasar internasional. Hal ini memungkinkan UKM untuk lebih fleksibel dan mudah beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah. Saat melakukannya, bisnis dapat belajar (1) di mana mendapatkan barang, (2) berapa biayanya, (3) di mana mencari investor, (4) jenis pekerja apa yang tersedia, dan (5) apa yang adil. upah atau kompensasi untuk membayar mereka.

Kasimpulan

Tampaknya krisis ekonomi yang mengguncang Indonesia pada tahun 1997-1998 telah membuat perekonomian negara itu kacau balau. Terlepas dari tantangan yang mereka hadapi, UMKM tetap diangkat sebagai pahlawan ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan peningkatan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sejak krisis ekonomi. Bahwa UKM dapat mengatasi badai ekonomi apa pun juga ditunjukkan di sini. Ada juga peningkatan jumlah orang yang dipekerjakan oleh UMKM di seluruh negeri, dari 96,99% menjadi 97,22%. (2012-2017). Usaha kecil dan menengah (UKM) dapat meningkatkan perekonomian dengan meningkatkan lapangan kerja dan upah. Akibatnya, UMKM memainkan peran penting dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian setiap negara, sehingga sangat penting bagi pemerintah untuk terus memberdayakan perusahaan-perusahaan ini agar dapat memenuhi fungsi vitalnya.

Daftar Pustaka

- Cep Jandi Anwar (2016), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Foreign Direct Investment (Fdi) Di Kawasan Asia Tenggara, Media Trend Vol. II No. 2
- Effendi Ishak. 2005. Artikel : Peranan Informasi Bagi Kemajuan UKM. Kedaulatan Rakyat. Yogyakarta

- Indra Suhendra (2016), Tingkat Pendidikan, Upah, Inflasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi-Qu* Vol. 6, No. 1
- Pujiono, (2012) Akselerasi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Pendidikan, *Proceeding Seminar Nasional Peningkatan Kapabilitas UMKM dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas*
- Rah Adi Fahmi Ginanjar, dkk (2018), Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Banten, *Jurnal Ekonomi-Qu*, Vol. 8, No. 2
- Wahyudin, Dian. 2013. *Peluang atau Tantangan Indonesia Menuju ASEAN Economic Community 2015*. Lembaga Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Zahara, V.M., Sanusi, F. & Suci, S.C. (2020). Pengembangan Jejaring Bisnis Berbasis Produk Lokal Kota Cilegon. *Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat*, 1(2), 168- 177.